



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

**BALAI
PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PALMA**

018.09.1700.238027.KD



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
2025**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada parapengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Manado, 23 Januari 2026
Kepala BRMP Tanaman Palma

Dr. Steivie Karouw, S.TP, M.Sc
NIP. 197209052000032001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Manado, 23 Januari 2026
Kepala BRMP Tanaman Palma


Dr. Steivie Karouw, S.TP, M.Sc
NIP. 197209052000032001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi.....	i
Daftar Lampiran.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	26
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca.....	30
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional.....	36
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	41
F. Penungkapan Penting Lainnya.....	43
VI. Lampiran.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Hasil Rekonsiliasi
Lampiran 2	Rekon Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025
Lampiran 3	Laporan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Laporan Realisasi Belanja Per Akun Per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Laporan Neraca Per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Laporan Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal Per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Laporan Neraca Percobaan Akrua Per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Neraca Percobaan Kas Per 31 Desember 2025
Lampiran 9	Laporan Operasional Per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Catatan Hasil Reviu (CHR)
Lampiran 12	Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
Lampiran 13	LPJ Pengeluaran Bulan Desember 2025

DAFTAR TABEL

Kode	Keterangan	Halaman
	Laporan Realisasi Anggaran.....	3
	Neraca.....	4
	Laporan Operasional.....	5
	Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
A.2.1	Anggaran Satuan Kerja.....	8
B.1	Anggaran Realisasi PNB.....	26
B.1.1	Anggaran dan Realisasi PNB Lainnya.....	27
B.1.2	Realisasi Pendapatan Lain-Lain.....	28
B.2	Anggaran Realisasi Belanja.....	28
B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program.....	28
B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	29
B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Jenis.....	29
B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang yang Menghasilkan Barang Persediaan.....	29
B.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	29
C.1	Saldo Aset.....	30
C.1.1	Saldo Aset Lancar.....	30
C.1.3	Saldo Piutang Bukan Pajak.....	30
C.1.3.1	Saldo Piutang Bukan Pajak.....	31
C.1.4	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.....	31
C.1.5	Saldo Persediaan.....	31
C.2	Rincian Aset Tetap.....	32
C.2.1	Rincian Tanah Berdasarkan NUP.....	32
C.2.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin.....	33
C.2.3	Rincian Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan.....	33
C.2.4	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan dan Irigasi.....	34
C.2.5	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya.....	34
C.2.6	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	34
C.3	Rincian Saldo Aset Lainnya.....	35
C.3.1	Rincian Saldo Aset Tetap Tak Berwujud.....	35
C.3.1.1	Perbandingan Rincian Asset Tak Berwujud per Jenis Aset.....	35
C.3.2	Saldo Aset Lain-Lain.....	35
C.3.3	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB.....	36
D.1	Kegiatan Operasional.....	36
D.2.1.1	Beban Pegawai.....	37
D.2.1.1.1	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO.....	38
D.2.1.2	Beban Persediaan.....	38
D.2.1.2.1	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan per 31 Desember 2025 di LRA dan LO.....	38
D.2.1.3	Beban Barang dan Jasa.....	39

D.2.1.3.1	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 di LRA dan LO.....	39
D.2.1.4	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 di LRA dan LO.....	39
D.2.1.5	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 di LRA dan LO.....	40
D.2.1.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	40
D.2.1.7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	41
D.3.1	Kegiatan Non Operasional BRMP Tanaman Palma.....	41
E.1	Transaksi Antar Entitas	42

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp1.068.172.000,00 atau 139,6% dari anggaran sebesar Rp765.120.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.283.684.349,00 atau mencapai 99,70% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.314.601.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.954.609.117.759,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp80.110.975,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.954.609.117.759,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp20.915.385,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.954.710.144.119,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.036.687.000,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp11.629.251.631,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp10.592.564.631,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga pada 31 Desember 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp10.592.564.631,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.956.087.196.401,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp10.592.564.631,00), Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.215.512.349,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.954.710.144.119,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PERAJITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi Per 31 Des 2025	%	Realisasi Per 31 Des 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	765.120.000,00	1.068.172.000,00	139,60	848.876.152,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		765.120.000,00	1.068.172.000,00	139,60	848.876.152,00
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.546.074.000,00	3.524.160.164,00	99,38	3.656.622.239,00
Belanja Barang	B.2.2	6.484.118.000,00	6.476.070.145,00	99,87	6.867.639.196,00
Belanja Modal	B.2.3	284.409.000,00	283.454.040,00	99,66	58.541.000,00
JUMLAH BELANJA NEGARA		10.314.601.000,00	10.283.684.349,00	99,70	10.582.802.435,00



Manado, 31 Desember 2025
Kepala BRMP Tanaman Palma,

Dr. Stevie Karouw, S.TP, M.Sc.

II. NERACA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	76.755.000,00	108.240.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.2	(383.775,00)	(541.200,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.3	76.371.225,00	107.698.800,00
Persediaan	C.4	3.739.750,00	8.046.150,00
JUMLAH ASET LANCAR		80.110.975,00	115.744.950,00
ASET TETAP			
Tanah	C.5	1.921.249.930.000,00	1.921.249.930.000,00
Peralatan dan Mesin	C.6	25.102.602.931,00	24.819.148.891,00
Gedung dan Bangunan	C.7	41.962.642.168,00	41.962.642.168,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8	2.860.887.068,00	2.860.887.068,00
Aset Tetap Lainnya	C.9	7.539.865,00	7.539.865,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.10	(36.574.484.273,00)	(34.982.736.495,00)
JUMLAH ASET TETAP		1.954.609.117.759,00	1.955.917.411.497,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11	657.000,00	675.000,00
Aset Lain-lain	C.12	3.712.730.137,00	3.712.730.137,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.13	(3.692.489.752,00)	(3.659.365.183,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		20.915.385,00	54.039.954,00
JUMLAH ASET		1.954.710.144.119,00	1.956.087.196.401,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	1.954.710.144.119,00	1.956.087.196.401,00
JUMLAH EKUITAS		1.954.710.144.119,00	1.956.087.196.401,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.954.710.144.119,00	1.956.087.196.401,00

Manado, 31 Desember 2025

Kepala BRMP Tanaman Palma,



Dr. Stevie Karouw, S.TP, M.Sc.

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PERAKIRAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
LAPORAN OPERASIONAL
YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.036.687.000,00	812.053.000,00	224.634.000,00	27,66
JUMLAH PENDAPATAN		1.036.687.000,00	812.053.000,00	224.634.000,00	27,66
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	3.524.160.164,00	3.656.622.239,00	(132.462.075,00)	(3,62)
Beban Persediaan	D.3	381.130.738,00	459.017.645,00	(77.886.907,00)	(16,96)
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.907.509.580,00	4.111.150.278,00	(203.640.698,00)	(4,95)
Beban Pemeliharaan	D.5	1.830.156.434,00	1.926.872.095,00	(96.715.661,00)	(5,01)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	361.579.793,00	362.553.028,00	(973.235,00)	(0,26)
Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	D.7	0,00	217.500.000,00	(217.500.000,00)	(100)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.624.872.347,00	1.708.783.918,00	(83.911.571,00)	(4,91)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(157.425,00)	541.200,00	(698.625,00)	(129,08)
JUMLAH BEBAN		11.629.251.631,00	12.443.040.403,00	(813.788.772,00)	(6,54)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.592.564.631,00)	(11.630.987.403,00)	1.038.422.772,00	(8,92)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0,00	0,00		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	0,00	145.063.152,00	145.063.152,00	(100,00)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(10.592.564.631,00)	(11.485.924.251,00)	893.359.620,00	(7,77)

Manado, 31 Desember 2025
Kepala BRMP Tanaman Palma,



Dr. Steivie Karouw, S.TP, M.Sc.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	1.956.087.196.401,00	1.957.839.194.369,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	E.2	(10.592.564.631,00)	(11.485.924.251,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	9.215.512.349,00	9.733.926.283,00
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	10.283.684.349,00	10.582.802.435,00
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	(1.068.172.000,00)	(848.876.152,00)
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(1.377.052.282,00)	(1.751.997.968,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	1.954.710.144.119,00	1.956.087.196.401,00

Manado, 31 Desember 2025

Kepala BRMP Tanaman Palma,



Dr. Steivie Karouw, S.TP, M.Sc.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma (BRMP Tanaman Palma) berkedudukan di Jalan Raya Mapanget, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai unit eselon III di bawah Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Didirikan pada tahun 1930 sebagai Klapper Proofstation (zaman colonial Belanda yang kemudian berganti nama seiring barjalannya waktu diantaranya LPTI (1967), Balitri (1979), Balitka (1984), Balit Palma (2011), BSIP Tanaman Palma (17 Januari 2023 – 27 Maret 2025), dan sejak 27 Maret 2025 menjadi BRMP Tanaman Palma yang memiliki tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, pengujian, dan modernisasi pertanian tanaman palma. BRMP Tanaman Palma adalah bagian dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang tugasnya mencakup:

1. Penyusunan kebijakan teknis perakitan, pengujian, dan modernisasi pertanian.
2. Pelaksanaan langsung kebijakan teknis tersebut di lapangan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan teknis dan inovasi pertanian.

Secara lebih khusus, kebijakan teknis untuk tanaman palma mencakup:

1. Perekayasa dan standardisasi alat/mesin budidaya, pengolahan, dan pengujian mutu tanaman palma.
2. Modernisasi sistem budidaya penerapan teknik monokultur melalui Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) budidaya kelapa.
3. Pengujian kesesuaian standar kegiatan budidaya, termasuk alat dan proses di lapangan.
4. Siaran teknis dan edukasi pelatihan pengendalian hama dan penyakit, budidaya berkelanjutan ke kelompok tani.
5. Surveilans dan akreditasi laboratorium pengawasan berkelanjutan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk memastikan kualitas hasil uji.
6. Pemangku peran dalam regulasi bersama BSN ikut merumuskan RSNI budidaya kelapa genomics hilir dan hilirisasi industri.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, BRMP Tanaman Palma memiliki Visi dan Misi :

Visi

“Menjadi lembaga perakitan dan pengujian tanaman palma yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima, mendukung pertanian modern, mandiri, dan berkelanjutan”.

Misi

- Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian tanaman palma yang berkelanjutan dan berdaya saing;
- Meningkatkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar khusus tanaman palma;
- Meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan teknis dan administratif;
- Mengembangkan jaringan kolaboratif dengan pemangku kepentingan (petani, PTPN, BSN, lembaga riset, pemerintah daerah, dan swasta) untuk inovasi budidaya dan teknologi palma.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker 238027 Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker 238027. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (sesuai dengan periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker 238027 disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 22 Januari 2026 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	10.949.871.000,00
2024	10.996.611.000,00
2023	12.091.455.000,00
2022	13.005.127.630,00

A.3 Basis Akuntansi

Satker 238027 menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker 238027 dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I Satker 238027 Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6 (enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset

sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan

belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtangannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar

pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker 238027 belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- b) telah diterbitkan:

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
- (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau

- c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

- c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
 - 3) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 238027 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

7. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2025 adalah sebesar Rp1.068.172.000,00 atau 139,61% dari anggaran sebesar Rp765.120.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNB

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Des 2024 (Rp)
425	Pendapatan PNB Lainya	765.120.000,00	1.068.172.000,00	139,61	848.876.152,00
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	762.120.000,00	1.029.115.000,00	135,03	805.140.000,00
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	1.000.000,00	7.572.000,00	757,20	6.913.000,00
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	18.323.152,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	31.485.000,00	0,00	18.500.000,00
Jumlah		765.120.000,00	1.068.172.000,00	139,61	848.876.152,00

B.1.1 PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.068.172.000,00 atau 139,61%. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp219.295.848,00 atau 39,61% dibandingkan periode 31 Desember 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	762.000.000,00	1.021.735.000,00	797.760.000,00	(113.968.000,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	120.000,00	0,00	7.380.000,00	(1.230.000,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	0,00	7.380.000,00	0,00	1.230.000,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,00	0,00	7.869.000,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0,00	0,00	10.454.152,00	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	6.972.000,00	3.913.000,00	350.000,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	31.485.000,00	18.500.000,00	13.835.000,00
Jumlah	765.120.000,00	1.068.172.000,00	848.876.152,00	116.044.300,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Hasil Pertanian Rp1.021.735.000,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih/bibit tanaman kelapa dan penjualan produk samping berupa kelapa konsumsi.
2. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi Rp7.380.000,00 merupakan pendapatan sewa rumah dinas.
3. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan Rp600.000,00 merupakan pendapatan jasa magang dan penelitian.
4. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya Rp6.972.000,00 merupakan pendapatan kunjungan wisata.
5. Pendapatan lain-lain sebesar Rp31.485.000,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain

Kode Akun	Uraian	Realisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	31.485.000,00	TGR Ex. Peneliti
	Jumlah Pendapatan	31.485.000,00	-

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 31 Desember 2025 Pada Satker 238027 sebesar Rp31.485.000,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional ex. Peneliti terhitung mulai bulan September 2022 hingga Desember 2023 dan Batas waktu penyelesaian tagihan sesuai dengan SPTJM hingga bulan Maret 2026.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.283.684.349,00 atau 96,24% dari anggaran belanja sebesar Rp10.949.871.000,00 namun terdapat blokir anggaran sebesar Rp635.270.000,00 sehingga pagu efektif yang tersedia sebesar Rp10.314.601.000,00 dengan persentase realisasi anggaran 99,70% yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Des 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	3.546.074.000,00	3.524.160.185,00	99,38	3.656.622.239,00
Belanja Barang	6.484.118.000,00	6.476.070.145,00	99,87	6.867.639.196,00
Belanja Modal	284.409.000,00	283.454.040,00	99,66	58.541.000,00
Jumlah	10.314.601.000,00	10.283.684.349,00	99,70	10.582.802.435,00

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program sampai 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	0	0	0,00	376.617.536,00
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	558.447.000,00	554.881.228,00	99,68	0,00
Program Dukungan Manajemen	9.756.154.000,00	9.008.951.275,00	99,70	10.206.184.899,00
Jumlah	10.314.601.000,00	10.283.684.349,00	99,70	10.582.802.435,00

Realisasi belanja sampai 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp299.118.086,00 atau 2,82%, apabila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran;
2. Dana pada beberapa kegiatan masih di blokir;
3. Nilai pagu tahun ini berkurang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
4. Terjadi pengurangan pegawai (Mutasi/Pensiun).

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.524.160.164,00 dan Rp3.703.461.000,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp179.300.836,00 atau 4,84% dibandingkan periode 31 Desember 2024. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya pegawai baik Mutasi maupun Purna Tugas sehingga mempengaruhi realisasi belanja.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA. 2025 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Des 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	3.267.052.000,00	3.247.820.143,00	99,41	3.556.623.239,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	178.988.000,00	176.351.021,00	98,53	0,00
Belanja Lembur	100.034.000,00	99.989.000,00	99,96	99.999.000,00
Jumlah	3.546.074.000,00	3.524.160.185,00	99,38	3.656.622.239,00

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp6.476.070.145,00 dan Rp6.867.639.196,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Des 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	2.742.430.000,00	2.741.751.169,00	99,98	2.794.706.281,00
Belanja Barang Non Operasional	526.760.000,00	526.630.651,00	99,97	626.215.640,00
Belanja Barang Persediaan	377.658.000,00	376.824.338,00	99,77	467.063.795,00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	641.900.000,00	639.127.760,00	99,57	690.228.357,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	1.830.900.000,00	1.830.156.434,00	99,96	1.926.872.095,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	364.470.000,00	361.579.793,00	99,20	362.553.028,00
Jumlah	6.484.118.000,00	6.476.070.145,00	99,87	6.867.639.196,00

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp376.824.338,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	377.658.000,00	376.824.338,00	99,77	467.063.795,00
Jumlah	377.658.000,00	376.824.338,00	99,77	467.063.795,00

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp283.454.040,00 dan Rp58.541.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal disajikan pada table berikut.

Tabel B.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.409.000,00	283.454.040,00	99,66	58.541.000,00
Jumlah	284.409.000,00	283.454.040,00	99,66	58.541.000,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.954.710.144.119,00 dan Rp1.956.087.196.401,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.377.052.282,00 atau 0,07% apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Aset Lancar	80.110.957,00	115.744.950,00
Aset Tetap	1.954.609.117.759,00	1.955.917.411.497,00
Aset Lainnya	20.915.385,00	54.039.954,00
Jumlah	1.954.710.144.119,00	1.956.087.196.401,00

C.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp80.110.975,00 dan Rp115.744.950,00. Saldo Aset Lancar per 31 Januari 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.633.975,00 atau 30,79%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1 Saldo Aset Lancar

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Bukan Pajak	76.755.000,00	108.240.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(383.775,00)	(541.200,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	76.371.225,00	107.698.800,00
Persediaan	3.739.750,00	8.046.150,00
Jumlah	80.110.975,00	115.744.950,00

C.1.2 PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp76.755.000,00 dan Rp108.240.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp31.485.000,00 atau 29,09% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2 Saldo Piutang Bukan Pajak

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	76.755.000,00	108.240.000,00	(31.485.000,00)
Jumlah			76.755.000,00	108.240.000,00	(31.485.000,00)

Tabel C.1.2.1 Saldo Piutang Bukan Pajak

No.	Nama	Sisa Pembayaran Per 31 Des 2025 (Rp)
1	Rahma, SP, M.Si	8.400.000,00
2	Engelbert Manaroinson, SP, M.Si	6.825.000,00
3	Linda Trivana, SP, M.Si	1.100.000,00
4	Lidyana Maya Gosal, S.Si, M.Si	3.600.000,00
5	Muhammad Nur, SP, M.Si	10.080.000,00
6	Dr. Novalisa Lumentut, SP, M.Sc	31.400.000,00
7	Patrik M. Pasang, S.TP, M.T	15.350.000,00
Jumlah		76.755.000,00

C.1.3 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp383.775,00 dan Rp541.200,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp157.425,00 atau 29,09% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.3 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Jenis Piutang	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	383.775,00	541.200,00	157.425,00
Jumlah		383.775,00	541.200,00	157.425,00

C.1.4 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.739.750,00 dan Rp8.046.150,00. Saldo dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.5 Saldo Persediaan

No.	Uraian Persediaan	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	3.739.750,00	8.046.150,00	(4.306.400,00)
Total		3.739.750,00	8.046.150,00	(4.306.400,00)

C.2 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.954.609.117.759,00 dan Rp1.955.917.411.497,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.308.293.738,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Rincian Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	1.921.249.930.000,00	1.921.249.930.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	21.102.602.931,00	24.819.148.891,00	283.454.040,00
3	Gedung dan Bangunan	41.962.642.168,00	41.962.642.168,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.860.887.068,00	2.860.887.068,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	7.539.865,00	7.539.865,00	0,00
6	Akumulasi Penyusutan	(36.574.484.273,00)	(34.982.736.495,00)	(1.591.747.778,00)
Jumlah		1.954.609.117.759,00	1.955.917.411.497,00	(1.308.293.738,00)

C.2.1 Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.921.249.930.000,00,00 dan Rp1.921.249.930.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1 Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	Jenis Tanah	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II (Luas 13.610 M2)	2.755.467.000,00	2.755.467.000,00	0,00
2	5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II (Luas 13.966 M2)	62.821.861.000,00	62.821.861.000,00	0,00
3	6	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II (Luas 20.244 M2)	41.566.195.000,00	41.566.195.000,00	0,00
4	7	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II (Luas 31.500 M2)	130.826.822.000,00	130.826.822.000,00	0,00
5	1	Tanah bangunan Mess/Wisma/Asrama (Luas 1.008 M2)	6.307.177.000,00	6.307.177.000,00	0,00
6	1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Luas 3.373 M2)	15.354.571.000,00	15.354.571.000,00	0,00
7	1	Tanah Untuk Bangunan Gereja (Luas 2.622 M2)	12.735.841.000,00	12.735.841.000,00	0,00
8	1	Tanah Kebun Percobaan (Luas 57.850 M2)	11.314.365.000,00	11.314.365.000,00	0,00
9	2	Tanah Kebun Percobaan (Luas 505.735 M2)	85.728.923.000,00	85.728.923.000,00	0,00
10	3	Tanah Kebun Percobaan (Luas 23.725 M2)	4.298.146.000,00	4.298.146.000,00	0,00
11	5	Tanah Kebun Percobaan (Luas 68.381 M2)	315.461.725.000,00	315.461.725.000,00	0,00
12	6	Tanah Kebun Percobaan (Luas 271.905 M2)	407.621.849.000,00	407.621.849.000,00	0,00
13	7	Tanah Kebun Percobaan	822.475.529.000,00	822.475.529.000,00	0,00

		(Luas 455.656 M2)			
14	1	Tanah Untuk Jalan Kota Madya (Luas 8.980 M2)	1.981.459.000,00	1.981.459.000,00	0,00
Jumlah			1.921.249.930.000,00	1.921.249.930.000,00	0,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp25.102.602.931,00 dan Rp24.819.148.891,00 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp283.454.040,00 atau 1,14% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per periode 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2024	24.819.148.891,00
B	Mutasi Tambah	24.819.148.891,00
1	Saldo Awal	24.819.148.891,00
2	Pembelian	284.409.000,00
C	Mutasi Kurang	0,00
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	25.102.602.931,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp41.962.642.168,00 dan Rp41.962.642.168,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sama apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.3 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	41.962.642.168,00
B	Mutasi Tambah	41.962.642.168,00
1	Saldo Awal	41.962.642.168,00
C	Mutasi Kurang	0,00
D	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	41.962.642.168,00

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.860.887.068,00 dan Rp2.860.887.068,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.4 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per 31 Desember 2024	2.860.887.068,00
B	Mutasi Tambah	2.860.887.068,00
1	Saldo Awal	2.860.887.068,00
C	Total Mutasi Kurang	0,00
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan Per 31 Desember 2025	2.860.887.068,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.539.865,00 dan Rp7.539.865,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.5 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	7.539.865,00
B	Mutasi Tambah	7.539.865,00
1	Saldo Awal	7.539.865,00
C	Mutasi Kurang	0,00
D	Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025	7.539.865,00

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp36.574.484.273,00 dan Rp34.982.736.495,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.591.747.778,00 atau 4,55% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.6 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	24.303.998.310,00	24.023.727.481,00	280.270.829,00
2	Gedung dan Bangunan	10.389.327.898,00	9.270.386.452,00	1.118.941.446,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.881.158.065,00	1.688.622.562,00	192.535.503,00
Jumlah		36.574.484.273,00	34.982.736.495,00	1.591.747.778,00

C.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp20.915.383,00 dan Rp54.039.954,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.124.569,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Saldo Aset Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	675.000,00	675.000,00	0,00
2	Aset Lain-lain	3.712.730.137,00	3.712.730.137,00	0,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(3.692.489.752,00)	(3.659.365.183,00)	(33.124.569,00)
Jumlah		20.915.385,00	54.039.954,00	(33.124.569,00)

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp675.000,00 dan Rp675.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB Per 31 Desember 2024	675.000,00
1	Saldo Awal	675.000,00
B	Mutasi Tambah	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
D	Saldo ATB Per 31 Desember 2025	675.000,00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1.1 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Paten	675.000,00	675.000,00	0,00
Jumlah		675.000,00	675.000,00	0,00

C.3.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.712.730.137,00 dan Rp3.712.730.137,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.2 Saldo Aset Lain-Lain

No.	Klasifikasi	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.712.730.137,00	3.712.730.137,00	0,00
Total		3.712.730.137,00	3.712.730.137,00	0,00

C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi

oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.692.489.752,00 dan Rp3.659.365.183,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp33.124.569,00 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024.

Tabel C.3.3 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	ATB	Paten	675.000,00	675.000,00	0.00
	Jumlah		675.000,00	675.000,00	0.00
2	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3.691.814.752,00	3.658.690.183,00	33.124.569,00
Total			3.692.489.752,00	3.659.365.183,00	33.124.569.00

C.4 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.954.710.144.119,00 dan Rp1.956.087.196.401,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.377.052.282,00 atau 0,07% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	1.036.687.000,00	812.053.000,00
Beban Operasional	11.629.251.631,00	12.443.040.403,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10.592.564.631,00)	(11.630.987.403,00)

D.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.036.687.000,00 dan Rp812.053.000,00. Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2024 sebesar Rp224.634.000,00 atau 27,66%.

D.1.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.036.687.000,00 dan Rp812.053.000,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp224.634.000,00 atau 27,66% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 di LRA disajikan sebesar Rp1.068.172.000,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 di LO disajikan sebesar Rp1.036.687.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp31.485.000,00 yang merupakan penerimaan belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional ex. Peneliti).

D.2.1 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11.629.251.631,00 dan Rp12.443.040.403,00. Nilai Beban Operasional Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp813.788.772,00 atau 6,54% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2024.

D.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.524.160.164,00 dan Rp3.656.622.239,00. Nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp132.462.075,00 atau 3,62% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2024. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.1 Beban Pegawai

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.247.820.143,00	3.556.623.239,00	(308.803.096,00)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	176.351.021,00	0,00	176.351.021,00
Beban Lembur	99.989.000,00	99.999.000,00	(10.000,00)
Jumlah	3.524.160.164,00	3.656.622.239,00	(132.462.075,00)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.1.1 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO			
Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.247.820.143,00	3.247.820.143,00	0,00
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	176.351.021,00	176.351.021,00	0,00
Belanja/Beban Lembur	99.989.000,00	99.989.000,00	0,00
Jumlah	3.524.160.164,00	3.524.160.164,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

D.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp381.130.738,00 dan Rp459.017.645,00. Nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp77.886.907,00 atau 16,96%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2024.

Rincian Beban Persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.2 Beban Persediaan			
Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Persediaan	381.130.738,00	459.017.645,00	77.886.907,00
Jumlah	381.130.738,00	459.017.645,00	77.886.907,00

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.2.1 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan per 31 Desember 2025 di LRA dan LO			
Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Persediaan	376.824.338,00	381.130.738,00	4.306.400,00
Jumlah	376.824.338,00	381.130.738,00	4.306.400,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO senilai Rp4.306.400,00 selisih ini dikarenakan nilai operasional melebihi nilai belanja TA. 2025.

D.2.1.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.907.509.580,00 dan Rp4.111.150.278,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp203.640.698,00 atau 4,95% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa

per 31 Desember 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.3 Beban Barang dan Jasa

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.741.751.169,00	2.794.706.281,00	(52.955.112,00)
Beban Barang Non Operasional	526.630.651,00	626.215.640,00	(99.584.989,00)
Beban Jasa			
Beban Jasa	639.127.760,00	690.228.357,00	(51.100.597,00)
Jumlah	3.907.509.580,00	4.111.150.278,00	(203.640.698,00)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.3.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 di LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2.741.751.169,00	2.741.751.169,00	0,00
Belanja/Beban Barang Non Operasional	526.630.651,00	526.630.651,00	0,00
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	639.127.760,00	639.127.760,00	0,00
Jumlah	3.907.509.580,00	3.907.509.580,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO.

D.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.830.156.434,00 dan Rp1.926.872.095,00. Nilai Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp96.715.661,00 atau 5,01% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024.

Perbandingan belanja/beban pemeliharaan di LRA dengan nilai pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut.:

Tabel D.2.1.4 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	968.216.284,00	968.216.284,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	861.940.150,00	861.940.150,00	0,00
Jumlah	1.830.156.434,00	1.830.156.434,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Beban Pemeliharaan di LRA dengan nilai Pemeliharaan di LO.

D.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini

termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp361.579.793,00 dan Rp362.553.028,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp973.235,00 atau 0,26% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024.

Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO disajikan pada table berikut :

Tabel D.2.1.5 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	361.579.793,00	361.579.793,00	0,00
Jumlah	361.579.793,00	361.579.793,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Beban Perjalanan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO.

D.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.624.872.347,00 dan Rp1.708.783.918,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp83.911.571,00 atau 4,91% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	280.270.829,00	368.623.335,00	(88.352.506,00)
		Gedung dan Bangunan	1.118.941.446,00	1.119.643.670,00	(702.224,00)
		Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	192.535.503,00	192.535.503,00	0,00
		Aset Tetap Lainnya	33.124.596,00	27.981.410,00	5.143.186,00
	Jumlah				
Total			1.624.872.347,00	1.708.783.918,00	(83.911.571,00)

D.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp157.425,00 dan Rp541.200,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp383.775,00 atau 70,91% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tabel D.2.1.7 Debit Penjualan Piutang Tak Tertagih					
No.	Uraian		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	157.425,00	541.200,00	(383.775,00)
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total			157.425	541.200	(383.775,00)

D.3 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Periode 31 Desember 2025, BRMP Tanaman Palma mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp10.592.564.631,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.038.422.772,00 atau 8,92% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.630.987.403,00.

D.4 SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional BRMP Tanaman Palma Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1. Kegiatan Non Operasional BRMP Tanaman Palma

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	145.063.152,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	145.063.152,00

D.5 SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Periode 31 Desember 2025, BRMP Tanaman Palma mengalami Defisit LO sebesar Rp10.592.564.631,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp893.359.620,00 atau 7,77% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Per 31 Desember 2024 Sebesar Rp11.485.924.251,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.956.087.196.401,00 dan Rp1.957.839.194.369,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.751.997.968,00 atau 0,09% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.592.564.631,00 dan Rp11.485.924.251,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp893.359.620,00 atau 7,78% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.215.512.349,00 dan Rp9.733.926.283,00. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp518.413.934,00 atau 5,33% apabila dibandingkan dengan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian Transaksi Antar Entitas BRMP Tanaman Palma Per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.3 Transaksi Antar Entitas

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	(1.068.172.000,00)
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.283.684.349,00
Transfer Masuk	0,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah	9.215.512.349,00

E.3.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.289.684.349,00 dan Rp10.582.802.436,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp293.118.087,00 atau 2,76% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar –Rp1.068.172.000,00 dan Rp848.876.152,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp219.295.848,00 atau 25,83% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Periode 31 Desember 2025, BRMP Tanaman Palma mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp1.377.052.282,00. Nilai penurunan tersebut lebih kecil Rp374.945.686,00 atau 21,4% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas periode 31 Desember 2024 sebesar Rp1.751.997.968,00.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.954.710.144.119,00 dan Rp1.956.087.196.401,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.377.052.282,00 atau 0,07% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PEMBIAYAAN

1. Terdapat kegiatan yang dibiayai oleh DIPA Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian No.018.09.2.648673/2025 Tanggal 2 Desember 2024; Kode MAK: 018.09.EC.7911.QDB.101.015.051G.522191 untuk kegiatan Pengembangan Kebun Benih Sumber Kelapa Terstandar dengan total realisasi sebesar Rp288.667.959,00.
2. Terdapat kegiatan kerjasama/kemitraan dengan Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk kegiatan Optimalisasi Kebun Induk Varietas Kelapa Unggul Mendukung Program Peremajaan dengan anggaran sebesar Rp299.980.250,00.

F.2 CATATAN DALAM MON SAKTI

1. Tidak terdapat *To DO List* periode 31 Desember 2025;
2. Telah melakukan Rekonsiliasi dan memperoleh SHR (Surat Hasil Rekon) periode Desember 2025.

VI. LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KPPN MANADO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 238027 - BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 23/01/26 10:08
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,949,871,000	10,949,871,000	0
2	Belanja	10,283,684,370	10,283,684,370	0
3	Pengembalian Belanja	-21	-21	0
4	Estimasi Pendapatan	765,120,000	765,120,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,068,172,000	1,068,172,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA 238027

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new_poc



URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	
			5	%			9	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak								
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya								
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)								
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat								
1. Belanja Pegawai								
2. Belanja Barang								
3. Belanja Modal								
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang								
5. Belanja Subsidi								
6. Belanja Hibah								
7. Belanja Bantuan Sosial								
8. Belanja Lain-lain								
II. Transfer ke Daerah								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESOLON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1700
SATUAN KERJA : 238027

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/01/26 8:37 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	762,000,000	1,021,735,000	0	1,021,735,000	134.09
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	120,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,380,000	0	7,380,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	762,120,000	1,029,115,000	0	1,029,115,000	135.03
4252	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251					
425289	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2,000,000	0	0	0	0
	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252					
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1,000,000	600,000	0	600,000	60
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	6,972,000	0	6,972,000	0
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1,000,000	7,572,000	0	7,572,000	757.2
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,485,000	0	31,485,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259					
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	765,120,000	1,068,172,000	0	1,068,172,000	139.61
	JUMLAH PENDAPATAN	765,120,000	1,068,172,000	0	1,068,172,000	139.61

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 09	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal	: 23/01/26 8:37 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 1700	SULAWESI UTARA	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	: 238027	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_saker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 23/1/26 2:32 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,305,017,000	2,306,999,000	2,304,611,920	0	2,304,611,920	99.9	2,387,080
51119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60,000	60,000	34,072	21	34,051	56.75	25,949
51121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	209,198,000	179,069,000	178,627,712	0	178,627,712	99.75	441,288
51122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,979,000	37,496,000	37,248,378	0	37,248,378	99.34	247,622
51123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
51124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	166,460,000	173,420,000	172,780,000	0	172,780,000	99.63	640,000
51125	Belanja Tunj. PPh PNS	20,464,000	21,413,000	20,850,242	0	20,850,242	97.37	562,758
51126	Belanja Tunj. Beras PNS	131,982,000	116,477,000	116,016,840	0	116,016,840	99.6	460,160
51129	Belanja Uang Makan PNS	431,926,000	351,998,000	337,726,000	0	337,726,000	95.95	14,272,000
51151	Belanja Tunjangan Umum PNS	56,630,000	54,920,000	54,725,000	0	54,725,000	99.64	195,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,391,916,000	3,267,052,000	3,247,820,164	21	3,247,820,143	99.41	19,231,857
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	119,856,000	118,749,473	0	118,749,473	99.08	1,106,527
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	7,000	2,942	0	2,942	42.03	4,058
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,032,000	6,779,638	0	6,779,638	96.41	252,362
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,909,000	1,698,883	0	1,698,883	88.99	210,117
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	6,200,000	5,940,000	0	5,940,000	95.81	260,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	7,524,000	7,429,085	0	7,429,085	98.74	94,915
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	30,500,000	29,946,000	0	29,946,000	98.18	554,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	5,960,000	5,805,000	0	5,805,000	97.4	155,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	178,988,000	176,351,021	0	176,351,021	98.53	2,636,979
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	100,000,000	100,034,000	99,989,000	0	99,989,000	99.96	45,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	100,000,000	100,034,000	99,989,000	0	99,989,000	99.96	45,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,491,916,000	3,546,074,000	3,524,160,185	21	3,524,160,164	99.38	21,913,836
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran	2,522,446,000	2,441,086,000	2,440,892,827	0	2,440,892,827	99.99	193,173
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,944,000	10,944,000	10,928,000	0	10,928,000	99.85	16,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,000,000	5,000,000	4,991,000	0	4,991,000	99.82	9,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	89,400,000	77,760,000	77,619,000	0	77,619,000	99.82	141,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	207,640,000	207,640,000	207,320,342	0	207,320,342	99.85	319,658

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 09	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal	: 23/01/26 8:37 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 1700	SULAWESI UTARA	Halaman	: 2
SATUAN KERJA	: 238027	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 23/1/26 2:32 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,835,430,000	2,742,430,000	2,741,751,169	0	2,741,751,169	99.98	678,831
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	46,100,000	197,260,000	97,650,751	0	97,650,751	49.5	99,609,249
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	409,000,000	481,500,000	428,979,900	0	428,979,900	89.09	52,520,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	455,100,000	678,760,000	526,630,651	0	526,630,651	77.59	152,129,349
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	377,658,000	388,998,000	376,824,338	0	376,824,338	96.87	12,173,662
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	377,658,000	388,998,000	376,824,338	0	376,824,338	96.87	12,173,662
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	450,000,000	425,000,000	423,684,903	0	423,684,903	99.69	1,315,097
522112	Belanja Langganan Telepon	36,000,000	34,100,000	33,082,309	0	33,082,309	97.02	1,017,691
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	204,000,000	172,000,000	171,560,548	0	171,560,548	99.74	439,452
522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	700,800,000	641,900,000	639,127,760	0	639,127,760	99.57	2,772,240
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	968,400,000	968,400,000	968,216,284	0	968,216,284	99.98	183,716
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	847,250,000	862,500,000	861,940,150	0	861,940,150	99.94	559,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,815,650,000	1,830,900,000	1,830,156,434	0	1,830,156,434	99.96	743,566
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206,400,000	836,400,000	361,579,793	0	361,579,793	43.23	474,820,207
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	206,400,000	836,400,000	361,579,793	0	361,579,793	43.23	474,820,207
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,391,038,000	7,119,388,000	6,476,070,145	0	6,476,070,145	90.96	643,317,855
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400,000,000	284,409,000	283,454,040	0	283,454,040	99.66	954,960
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	400,000,000	284,409,000	283,454,040	0	283,454,040	99.66	954,960
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	400,000,000	284,409,000	283,454,040	0	283,454,040	99.66	954,960
	JUMLAH BELANJA	10,282,954,000	10,949,871,000	10,283,684,370	21	10,283,684,349	93.92	666,186,651

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	76,755,000	108,240,000	(31,485,000)	(29.09)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(383,775)	(541,200)	157,425	(29.09)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	76,371,225	107,698,800	(31,327,575)	(29.09)
Persediaan	3,739,750	8,046,150	(4,306,400)	(53.52)
JUMLAH ASET LANCAR	80,110,975	115,744,950	(35,633,975)	(30.79)
ASET TETAP				
Tanah	1,921,249,930,000	1,921,249,930,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	25,102,602,931	24,819,148,891	283,454,040	1.14
Gedung dan Bangunan	41,962,642,168	41,962,642,168	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,860,887,068	2,860,887,068	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	7,539,865	7,539,865	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(36,574,484,273)	(34,982,736,495)	(1,591,747,778)	4.55
JUMLAH ASET TETAP	1,954,609,117,759	1,955,917,411,497	(1,308,293,738)	(0.07)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	675,000	675,000	0	0.00
Aset Lain-lain	3,712,730,137	3,712,730,137	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,692,489,752)	(3,659,365,183)	(33,124,569)	0.91
JUMLAH ASET LAINNYA	20,915,385	54,039,954	(33,124,569)	(61.30)
JUMLAH ASET	1,954,710,144,119	1,956,087,196,401	(1,377,052,282)	(0.07)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,954,710,144,119	1,956,087,196,401	(1,377,052,282)	(0.07)
JUMLAH EKUITAS	1,954,710,144,119	1,956,087,196,401	(1,377,052,282)	(0.07)
JUMLAH EKUITAS	1,954,710,144,119	1,956,087,196,401	(1,377,052,282)	(0.07)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,954,710,144,119	1,956,087,196,401	(1,377,052,282)	(0.07)

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. STEIVIE KAROUW, STP, M.Sc

NIP 197209052000032001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 1700

SATUAN KERJA : 238027

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

SULAWESI UTARA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl. Cetak 23/01/2026 8:38 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	108,240,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	541,200
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,046,150	0
0.0	131111	Tanah	1,921,249,930,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	24,819,148,891	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	41,962,642,168	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,195,826,000	0
0.0	134112	Irigasi	364,344,034	0
0.0	134113	Jaringan	300,717,034	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	7,539,865	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	24,023,727,481
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,270,386,452
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,456,966,642
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	155,033,660
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	76,622,260
0.0	162141	Paten	675,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,712,730,137	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,658,690,183
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	675,000
0.0	391111	Ekuitas	0	1,956,087,196,401
JUMLAH			1,994,729,839,279	1,994,729,839,279

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	76,755,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	383,775
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,739,750	0
0.0	131111	Tanah	1,921,249,930,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	25,102,602,931	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	41,962,642,168	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,195,826,000	0
0.0	134112	Irigasi	364,344,034	0
0.0	134113	Jaringan	300,717,034	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	7,539,865	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	24,303,998,310
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,389,327,898
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,619,013,388
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	175,562,649
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	86,582,028
0.0	162141	Paten	675,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,712,730,137	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,691,814,752
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	675,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,283,684,349
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,068,172,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,956,087,196,401
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	1,021,735,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	7,380,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	600,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	6,972,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,304,611,920	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	34,051	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	178,627,712	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	37,248,378	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	172,780,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	20,850,242	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	116,016,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	337,726,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	54,725,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	118,749,473	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,942	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,779,638	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,698,883	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,940,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7,429,085	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	29,946,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	5,805,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	99,989,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,440,892,827	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10,928,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,991,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	77,619,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	207,320,342	0
3.0	521211	Beban Bahan	97,650,751	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	428,979,900	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	423,684,903	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	33,082,309	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	171,560,548	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	10,800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	968,216,284	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	861,940,150	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	361,579,793	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	280,270,829	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,118,941,446	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	162,046,746	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	20,528,989	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	9,959,768	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	33,124,569	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	376,420,738	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	4,710,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	157,425
JUMLAH			2,007,675,082,975	2,007,675,082,975

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. STEIVIE KAROUW, STP, M.Sc
NIP 197209052000032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	10,283,684,349
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,068,172,000	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	1,021,735,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	7,380,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	600,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	6,972,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,485,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,304,611,920	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,072	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	178,627,712	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,248,378	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	172,780,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	20,850,242	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	116,016,840	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	337,726,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	54,725,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	118,749,473	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,942	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,779,638	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,698,883	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,940,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,429,085	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	29,946,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	5,805,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	99,989,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,440,892,827	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,928,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,991,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77,619,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	207,320,342	0
3.0	521211	Belanja Bahan	97,650,751	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	428,979,900	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	376,824,338	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	423,684,903	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	33,082,309	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	171,560,548	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	968,216,284	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	861,940,150	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	361,579,793	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283,454,040	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	21
JUMLAH			11,351,856,370	11,351,856,370

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. STEIVIE KAROUW, STP, M.Sc

197209052000032001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,036,687,000	812,053,000	224,634,000	27.662
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,036,687,000	812,053,000	224,634,000	27.662
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,036,687,000	812,053,000	224,634,000	27.662
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,524,160,164	3,656,622,239	(132,462,075)	(3.623)
Beban Persediaan	381,130,738	459,017,645	(77,886,907)	(16.968)
Beban Barang dan Jasa	3,907,509,580	4,111,150,278	(203,640,698)	(4.953)
Beban Pemeliharaan	1,830,156,434	1,926,872,095	(96,715,661)	(5.019)
Beban Perjalanan Dinas	361,579,793	362,553,028	(973,235)	(0.268)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	217,500,000	(217,500,000)	(100)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,624,872,347	1,708,783,918	(83,911,571)	(4.911)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(157,425)	541,200	(698,625)	(129.088)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	11,629,251,631	12,443,040,403	(813,788,772)	(6.54)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,592,564,631)	(11,630,987,403)	1,038,422,772	(8.928)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	145,063,152	(145,063,152)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	145,063,152	(145,063,152)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	145,063,152	(145,063,152)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,592,564,631)	(11,485,924,251)	893,359,620	(7.778)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,592,564,631)	(11,485,924,251)	893,359,620	(7.778)

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. STEIVIE KAROUW, STP, M.Sc
NIP 197209052000032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,956,087,196,401	1,957,839,194,369	(1,751,997,968)	(0.09)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,592,564,631)	(11,485,924,251)	893,359,620	(7.78)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,215,512,349	9,733,926,283	(518,413,934)	(5.33)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,377,052,282)	(1,751,997,968)	374,945,686	(21.4)
EKUITAS AKHIR	1,954,710,144,119	1,956,087,196,401	(1,377,052,282)	(0.07)

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. STEIVIE KAROUW, STP, M.Sc

NIP 197209052000032001

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2025-12

Sequence LPJ : 00013/LPJ/23802700/12/2025

Kode Satker : 238027

Nama Satker : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Tanggal Kirim : 14/01/2026 08:53

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Manado (049) dengan timestamp 14/01/2026 18:04 WITA.

Petugas Validator LPJ :

Staf : GABBY YUAN KOLONDA pada 14/01/2026 17:27.

Kasi : VICTOR RONALD TADANUGI pada 14/01/2026 18:04.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-018.09.2.238027/2025

Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (17.02) SULAWESI UTARA / KAB. MINAHASA KPPN : (049) Manado

Satuan Kerja : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00401/SSP/238027/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	120.000.000,00	1.083.313.502,00	1.203.313.502,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	120.000.000,00	1.083.313.502,00	1.203.313.502,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	120.000.000,00	499.537.377,00	619.537.377,00	0,00
	1. BP UP*)	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	488.592.129,00	488.592.129,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	10.945.248,00	10.945.248,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00 karena -
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena -
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00 karena -
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00 karena -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. STEIVIE KAROUW, STP, M.Sc
NIP 197209052000032001

KAB. MINAHASA, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran


MARNEX MANDAKE

NIP 196803312006041005

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650172380271000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00401/SSP/238027/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.-II.A.3)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00 karena -

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00 karena -

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00 karena -

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00 karena -

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



MARNEX MANDAKE
NIP 196803312006041005

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. STEIVIE KAROUW, STP, M.Sc
NIP 197209052000032001

Dicetak pada tanggal, 13 Januari 2026

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 238027

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65017238027100 0	BPG 049 BALIT PALMA	BRI KC Pasar Minggu	20	S- 1253/W/PB.12/KP. 05/2020	25-06-2020	2025-12-30	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



MARNEX MANDAKE
 NIP 196803312006041005

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2025

Kementerian / Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Propinsi / Kabupaten / Kota : (17.02) SULAWESI UTARA / KAB. MINAHASA

Satuan Kerja : (238027) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA23802700-

No Rekening : 650172380271000

Nama Rekening : BPG 049 BALIT PALMA

Nama Bank : BRI KC Pasar Minggu

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2025			95.183.996,00
01-12-2025	FPK-PENG-xPS0F7Rt1FzBZtE	[DARI TUNAI] PU Bank Uang Persediaan	0,00	95.183.996,00	0,00
08-12-2025	FPK-PENG-TIbMbbKhUsnjSj1	TUP Ung Persediaan	488.592.129,00	0,00	488.592.129,00
12-12-2025	FPK-PENG-0Xuzk8mp2Q4m2Rf	[DARI TUNAI] PU Bank TUP	0,00	140.000.000,00	348.592.129,00
17-12-2025	FPK-PENG-nQIA11ELLlcFu2A	[DARI TUNAI] PU Bank uang TUP	0,00	40.000.000,00	308.592.129,00
19-12-2025	FPK-PENG-yRsbOsHS12aMCWc	PTUP Nihil	0,00	0,00	308.592.129,00
19-12-2025	FPK-PENG-qjkwULeT0iYttrP	PTUP Nihil	0,00	0,00	308.592.129,00
19-12-2025	FPK-PENG-heKgtjiWvWwiv8m	GUP Nihil	0,00	0,00	308.592.129,00
19-12-2025	FPK-PENG-XniOAxsoy2zqzsC	GUP Nihil	0,00	0,00	308.592.129,00
19-12-2025	FPK-PENG-pl0R95GchKtZ5m	GUP Nihil	0,00	0,00	308.592.129,00

1	2	3	4	5	6
22-12-2025	FPK-PENG- cRYD1SfjBFjHLkL	[DARI TUNAI] PU Bank Uang TUP	0,00	308.592.129,00	0,00
24-12-2025	FPK-PENG- q9mHqI4Hhur1TnZ	PTUP Nihil	0,00	0,00	0,00
29-12-2025	FPK-PENG- sZf5aMPPa6H60tm	GUP Nihil TUP	0,00	0,00	0,00
29-12-2025	FPK-PENG- oerbCpyowulqYQR	GUP Nihil TUP	0,00	0,00	0,00
30-12-2025	FPK-PENG- ROsA0OHJonoLrDP	PTUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00
Jumlah			488.592.129,00	583.776.125,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



MARNEX MANDAKE
NIP 196803312006041005

Ditandatangani tanggal 13 Januari 2026

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.
 ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-12

Kode Satker : 238027

Kode KPPN : 049

Nama Satker : BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
MANADO

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	Tanggal 01 senilai Rp 120,000,000, Tanggal 12 senilai Rp 260,000,000, Tanggal 15 senilai Rp 72,626,619, Tanggal 17 senilai Rp 84,083,719, Tanggal 22 senilai Rp 221,613,159, Tanggal 23 senilai Rp 217,743,676, Tanggal 24 senilai Rp 128,331,841,
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.0.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Manado - 049

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pajak BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA (238027)

Cetak Tanggal 13-01-2026
Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	BEA9A80V6BP1NRLT 251222046133	411211	IDR	505,405	ADA
2	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	FAA073IRNVAVBLF8 251222046289	411211	IDR	972,558	ADA
3	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	646734F97OD31LIV 251222046359	411211	IDR	237,838	ADA
4	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	74B6E1Q0Q6948SGE 251222046469	411211	IDR	346,847	ADA
5	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	A559F80V6MT17PFP 251222046555	411211	IDR	353,229	ADA
6	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	CFCAC015O25HNSU A 251222046636	411211	IDR	1,332,883	ADA
7	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	1608C74HMH95KA 251222046730	411618	IDR	137,837	ADA
8	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	95E420TJ8MFJPDAB 251222046834	411618	IDR	265,243	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	80C871Q0QAFPEKR2 251222046900	411618	IDR	502,800	ADA
10	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	3FECC6848GAIIB67 251222046991	411618	IDR	36,757	ADA
11	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	FD8BF015NTAQN5R O 251222047063	411618	IDR	20,180	ADA
12	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	EE1F84F994387FIB 251222047179	411618	IDR	20,721	ADA
13	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	936363IRNK3DKFS0 251222047255	411618	IDR	23,423	ADA
14	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	71BD680V7QOISOAP 251222047340	411618	IDR	86,486	ADA
15	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	311F65BMN2IPER5E 251222047440	411618	IDR	126,126	ADA
16	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	27B285BMOO4V4TLA 251222047528	411618	IDR	128,447	ADA
17	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	FF1B83IRO2D3NBNG 251222047635	411618	IDR	484,685	ADA
18	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	422A54F99KJC4F35 251222047735	411618	IDR	1,303,750	ADA
19	049	119862	22-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	C8D21015PPHH8A2O 251222048445	411618	IDR	190,550	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	1B1ED4F97L1TILO3 251223018356	411211	IDR	345,360	ADA
21	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	3A0AB1Q0PJH627QE 251223018577	411211	IDR	374,793	ADA
22	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	F154780V84JAR4AV 251223018689	411211	IDR	569,146	ADA
23	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	E275C5BMNI2STD68 251223018802	411211	IDR	1,114,865	ADA
24	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	779043IRNKJIIBLE 251223018932	411211	IDR	396,306	ADA
25	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	CF8BC74HOR0HRI3O 251223019055	411618	IDR	94,189	ADA
26	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	1F9F874HOBFL4716 251223019204	411618	IDR	102,216	ADA
27	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	683B56846P6O8DC9 251223019345	411618	IDR	155,222	ADA
28	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	5F45B1Q0OVLVQ9PI 251223019428	411618	IDR	129,729	ADA
29	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	064B60TJ8S7M4CKR 251223019534	411618	IDR	132,972	ADA
30	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	335B974HNM95UO4G 251223019689	411618	IDR	304,054	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	A64F3015PE871EBI 251223019848	411618	IDR	108,108	ADA
32	049	119862	23-Des-25	BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA, MANADO BADAN PENEL 0000134247821000	541F42ME9NAI2FRF 251223019940	411618	IDR	42,523	ADA
TOTAL									10,945,248
									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 196803312006041005 pada 13-01-2026 14:19:18 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Manado - 049

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA (238027)

Cetak Tanggal 13-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	049	238027	10-Des-25	Bendahara Penerima BRMP Tanaman Palma 570103929823000	1348F2G503JP3D6E 251210037900	425911	IDR	500,000	ADA
2	049	238027	18-Des-25	Bendahara Penerima BRMP Tanaman Palma 570103929823000	A7D7F7QLV32B9J1C 251218036987	425911	IDR	2,000,000	ADA
3	049	238027	30-Des-25	MARNEX MANDAKE 572724714823000	D566739GGAGHPVU B 251230009081	815511	IDR	127,390,660	ADA
4	049	238027	30-Des-25	MARNEX MANDAKE 572724714823000	8E41152BFVLAJVT5 251230009386	815111	IDR	201,181	ADA
TOTAL								130,091,841	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 196803312006041005 pada 13-01-
2026 14:19:18 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Manado - 049

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pengembalian Belanja BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA (238027)

Cetak Tanggal 13-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 196803312006041005 pada 13-01-
2026 14:19:18 WIB.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN (09)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA (238027)
Rekening Induk : RKK BALITBANG KEMENT (033901xxxxxx309)
Virtual Account : 650172380271000 | BPG 049 BALAI PSIT PALMA
Periode : 01-12-2025 s/d 31-12-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-01	08:40:10	47536101	AP MARNEX MANDAKE	95.183.996,00	95.183.996,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2025-12-08	10:20:03	47917546	From 032901003295305 to 650172380271000 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Saiker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma 259891311322474000001	0,00	0,00	488.592.129,00	488.592.129,00	SPAN	
2025-12-12	08:09:15	48148399	ap marnex mandake	488.592.129,00	140.000.000,00	0,00	348.592.129,00	TELLER_CARD	
2025-12-17	13:14:30	48391413	marnex mandake	348.592.129,00	40.000.000,00	0,00	308.592.129,00	TELLER_CARD	
2025-12-22	10:05:52	48648261	ap marnex mandake	308.592.129,00	308.592.129,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi					583.776.125,00	488.592.129,00			
Saldo Akhir							0,00		

CATATAN HASIL REVIU (CHR)				
Kementerian Pertanian			Disusun oleh/Tanggal	M. Maududi Latif 28/01/2026
Inspektorat Jenderal			Direviu oleh/Tanggal	Ika Setiasih, S.P., M.Si 28/01/2026
			Direviu dan Disetujui oleh/Tanggal	Dr. Heni Nugraha, S.E., M.M. 28/01/2026
UAPA	018	Kementerian Pertanian		
UAPPA-E1	9	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
UAKPA	238027	BRMP Tanaman Palma		
Uraian Catatan Hasil Reviu				Indeks KKR
A	Penyelenggaraan Akuntansi			
	Telah sesuai			
B	Penyajian LK:			
	1. LRA			KKR LRA
	Realisasi PNPB sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp1.068.172.000,00 atau sebesar 139,6% dari target senilai Rp765.120.000,00 sedangkan pada LO senilai Rp1.036.687.000,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp31.485.000,00 yaitu berupa penerimaan belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, dan telah dijelaskan didalam CaLK			
	Realisasi Belanja pada LRA telah sesuai dengan Beban Operasioal pada LO			
	tidak terdapat belanja akun 526			
	2. LO			KKR LO
	Telah sesuai			
	3. LPE			KKR LPE
	Telah sesuai			
	4. Neraca			KKR Neraca
	Terdapat piutang bukan pajak senilai Rp76.755.000,00 merupakan TGR Tunjangan Peneliti			
	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Senilai Rp25.266.471.643,00 dan aset Jalan, Jembatan, Instalasi dan Jaringan senilai Rp2.374.471.034,00 belum diajukan PSP			
	Aset Lain-lain (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan) berupa aset intrakomtable senilai Rp3.712.730.137,00 seluruhnya belum diajukan usulan penghapusannya			
	5. CaLK			KKR CaLK
	CaLK telah disusun			
	6. CaLBMN			KKR CaLBMN
	CaLBMN telah disusun			
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui				
	1	Segera mengajukan penghapusan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan) berupa aset intrakomtable senilai Rp3.712.730.137,00.		

	2	Mengajukan usulan PSP terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan Senilai Rp25.266.471.643,00 dan aset Jalan, Jembatan, Instalasi dan Jaringan senilai Rp2.374.471.034,00.	
	Pereviu	Petugas Modul GLP	
		 Indra F. Sampel HP : 0822 7154 5369	
	M. Maududi Latif	Petugas Modul Aset Tetap	
		 Pangestika I. Putri HP: 0813 8835 2025	

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (238027) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

Kode dan Nama UAPPAW : (1700) Sulawesi Utara

Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Kode dan Nama K/L : (018) Kementerian Pertanian

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	v	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	v	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat		
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		v
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		v
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		v
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v
	a. Pagu/DIPA		
	b. Estimasi PNB		

	e. Pendapatan			Tidak
	f. Pengembangan Belanja			Tidak
	g. Kas BLU			Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran			Tidak
	i. Kas Hibah			Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung			Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)			Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)			Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya

	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		v	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	v		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	v		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	v		Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal	v		Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) .		v	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya apakah terdapat			Ya/Tidak

7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		v	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	v		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		v	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	v		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akreal?		v	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akreal pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akreal		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		v	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akreal			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akreal		v	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akreal		v	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akreal		v	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914. 1133XX.			Ya

		Ya	Tidak	Seharusnya
	LAK BLU			
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

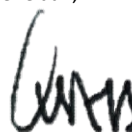
1. Saldo awal telah sesuai
2. Satker telah menyusun CaLK
3. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi internal, to do list sudah tidak ada
4. Transaksi Antar Entitas senilai Rp9.215.512.349 agar dijelaskan dalam CaLK

Mengetahui
Pejabat Penyusun LK,



(Indra F. Sampel)
NIP. 199301132022031001

Jakarta, 27 Januari 2026
Penelaah,



(Astri N. Istiana)
NIP 199507182018012001